

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Signaling

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh (Ross, 1977), dalam penelitiannya yang tentang “The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach”. Penelitian ini berasal dari penelitian karya Arkelof pada tahun 1970 “The Market for Lemons”, yang didalamnya membahas tentang informasi asimetri. Penelitian tersebut meneliti fenomena ketidakadilan antara kualitas produk yang dijual pedagang dan pembelinya, objek penelitiannya adalah paar mobil bekas.

Menurut penelitian dari Arkelof (1970) ketika pembeli tidak memiliki informasi terkait kualitas produk, maka penjual akan menjualnya dengan harga yang sama dan tidak perduli kualitasnya.

Penelitian Arkelof (1970) telah dikembangkan Spence (1973) tentang keseimbangan sinyal (basic Equilibrium). Penelitian ini menggambarkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik menggunakan informasi finansial untuk mengirimkan sinyal ke pasar. Penelitian Spence (1973) tersebut juga mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk maka akan mengirimkan sinyal atau bahkan tidak sama sekali.

Setelah penelitian dari Arkelof (1970) dan Spence (1983) selanjutnya Ross (1977) melakukan penelitian yang berjudul “*The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach* tentang teori

signaling” yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, sedangkan eksekutif yang mengetahui informasi yang kurang baik dari perusahaan maka akan cenderung tidak memberikan sinyal kepada publik. Penyampaian informasi tersebut adalah sebagai bentuk pemberian sinyal positif kepada publik untuk mengurangi asimetri informasi antara pemegang amanat atau eksekutif perusahaan dan publik.

Teori akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan akuntansi keuangan (Mardiasmo, 2002 : 143). Dalam Akuntansi Sektor Publik, Pemerintah diharapkan untuk transparan dan akuntabel terhadap rakyatnya agar tidak terjadinya asimetri informasi diantara keduanya. Teori signalling dapat diasumsikan bahwa pihak eksekutif itu adalah Pemerintah Daerah. Bahwasanya Pemerintah Daerah yang mempunyai kinerja yang baik, akan terdorong untuk memberikan sinyal positif kepada warganya, berupa penyediaan informasi keuangan yang jelas, mudah diakses dan lengkap. Hal itu bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi terhadap warganya, begitu juga sebaliknya.

2. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2002 : 18) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Transparansi anggaran dapat diukur melalui beberapa aspek, selain kemudahan akses pada informasi, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat juga harus diperhatikan.

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. *Website* atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Menurut Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan Proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Menurut Mardiasmo (2004:21), akuntabilitas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah akuntabilitas horizontal yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna layanan organisasi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dan Transparansi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini dibuat dengan bertujuan agar menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu

pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

4. Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda (*E-Government*)

Ketersediaan informasi merupakan salah satu indikator Transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006 : 73). Sedangkan ketersediaan *website* pemerintah daerah merupakan salah satu prinsip transparansi menurut Humanitarian Forum Indonesia. Sesuai dengan tujuan Akuntansi Sektor Publik dan Teori Signalling, pengungkapan informasi keuangan daerah di *Website* merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atau pemberian sinyal positif pemerintah terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dengan baik dan tepat. Ketersediaan informasi telah diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ yang mengatur pedoman pelaporan anggaran Pemda yang transparan dan akuntabel. Menurut Instruksi Mendagri tersebut terdapat 12 indikator ketersediaan informasi, yaitu dengan adanya Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah diaudit, dan Opini atas LKPD.

5. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/ produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang

lebih kecil (Patrick, 2007). Dalam Penelitian oleh Indah (2016) total aset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan ukuran suatu pemerintahan daerah karena dinilai lebih stabil dari pada pendapatan.

6. Rasio Kemandirian Finansial

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. (Halim, 2002 : 128) Semakin besarnya kemandirian finansial daerah mengindikasikan baiknya kinerja pemerintahan daerah maka akan mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi yang efektif dan efisien melalui *website* pemda guna kemudahan akses oleh masyarakat dan pihak eksternal lainnya.

7. Pendapatan Perkapita Daerah

Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Perkapita telah di standardisasi sebagai indikator ekonomi oleh United Nations System of National Accounts, dengan mengukur the total output barang dan jasa suatu negara pada periode tertentu. Digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan dari tahun ke tahun, juga untuk mengevaluasi dan membuat

pedoman standar hidup di negara itu, dan untuk kesejahteraan masyarakat. (Tjukanov, 2011). Sedangkan dalam level regional atau daerah, ada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh ekonomi dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. (Supartoyo dkk, 2013).

8. *Leverage*

Menurut Mubarakah (2012 : 169) Rasio *Leverage* merupakan tingkat penggunaan uang yang dipinjam oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian Ariefia Nosihana (2016) *Leverage* merupakan kemampuan pemerintah dalam menjamin dana yang dipinjamnya dalam memberikan pelayanan dan program-program bagi masyarakat baik untuk sekarang dan di masa yang akan datang.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ketersediaan informasi keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut adalah uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang membahas ketersediaan informasi keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	Komarudin Achmad (2014)	Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet	Variabel Independen : Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> , Kekayaan Pemda, Tipe Pemda, dan Opini Audit Variabel Dependen : IFR	1. Kompetisi Politik, ukuran pemda, <i>Leverage</i> , dan kekayaan pemda berpengaruh positif terhadap IFR 2. Tipe Pemda, dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap IFR
2	María del Carmen CABA PÉREZ (2014)	THE DETERMINANTS OF GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS ONLINE	Variabel Independen : Kompetisi Politik, Debt, Fiscal Pressure, Tingkat Pendidikan, Populasi, Akses Internet, Bentuk Pemerintahan, GDP Variabel Dependen : IFR	1. Kompetisi politik, dan Debt berpengaruh positif terhadap IFR 2. <i>Fiscal Pressure</i> , Tingkat Pendidikan, Populasi dan Akses Internet, Bentuk Pemerintahan tidak berpengaruh ke IFR

3	Ikhlas Wau (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kompetisi Politik, Ukuran Pemda, Rasio Kemandirian Finansial, Pendapatan Perkapita, dan Opini Audit</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Ketersediaan IFR dan Keteraksesan IFR</p>	<p>1. Kompetisi Politik , Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Finansial tidak berpengaruh terhadap Ketersediaan IFR</p> <p>2. Pendapatan perkapita, dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan IFR</p> <p>3. Kompetisi Politik, Ukuran Pemda, Pendapatan per kapita masyarakat dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Keteraksesan IFR</p> <p>4. Rasio Kemandirian Finansial berpengaruh positif terhadap Keteraksesan IFR</p>
4	Daniel Wicaksono, dkk (2016)	Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd114) Melalui Internet (Ifmgr) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kompetisi Politik, Kekayaan Pemda, <i>Leverage</i>, Tingkat Kemandirian, PDB, dan Opini Audit BPK</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>IFLGR</p>	<p>1. Kompetisi Politik, Kekayaan Daerah, <i>Leverage</i>, PDRB, dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap IFLGR</p> <p>2. Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap IFLGR</p>

5	Ade Lynda (2018)	The Determinant Disclosure Of Internet Financial Reporting In District And City Government In Indonesia	Variabel Independen : Ukuran Pemda, <i>Leverage</i> , Tipe Pemda, Rasio kemandirian finansial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Opini Audit Variabel Dependen : IFR	1.Ukuran Pemda, Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh positif terhadap IFR 2. <i>Leverage</i> , Rasio Kemandirian, Opini Audit tidak berpengaruh terhadap IFR
---	------------------	---	--	---

C. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan logika teoritis atas pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah, Rasio Kemandirian Finansial, Pendapatan Perkapita, dan *Leverage* terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Teori Akuntabilitas dan UU Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan bahwa pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah berupa informasi publik yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.

Berdasarkan Teori Signalling, yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, dengan cara memberi sinyal positif yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus, begitu juga sebaliknya

jika eksekutif mengetahui informasi yang kurang baik maka cenderung tidak akan memberikan sinyal kepada publik. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar tidak terjadi asimetri informasi dengan masyarakatnya (Ross, 1977).

Teori Signalling merupakan teori akuntansi keuangan. Namun dapat diasumsikan di Akuntansi Sektor Publik bahwasanya pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah yang memiliki informasi lebih baik mengenai pemerintahannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, bahwa pemerintahannya tersebut mempunyai kinerja yang bagus begitu juga sebaliknya jika pemerintah daerah menemukan adanya hal yang kurang baik di pemerintahan maka pemerintah daerah cenderung tidak akan memberikan sinyal terhadap warganya. Pemberian sinyal positif tersebut bertujuan agar masyarakat mendukung kinerja pemerintahannya dan tidak terjadi asimetri informasi dengan masyarakatnya.

Menurut Patrick (2007), Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset atau pegawai atau produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil.

Sedangkan Ketersediaan Laporan Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator Transparansi (Kristianten, 2006 : 73) Sedangkan dalam pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo, pengungkapan informasi keuangan daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah. Dimana Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah

satu karakteristik *Good Governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2002 : 18). Dan menurut Humanitarian Forum Indonesia ada 6 prinsip transparansi salah satunya adalah adanya *Website* atau media publikasi organisasi.

Dihubungkan dengan Teori Signalling bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki informasi yang lebih baik mengenai pemerintahannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, bahwa pemerintahannya tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Untuk menghindari terjadinya asimetri informasi diantara keduanya. Dalam Variabel Ukuran Pemerintahan Daerah, bahwa semakin besar Ukuran Pemerintahan Daerah dengan aset yang besar pula dapat menunjukkan kinerja pemerintahan yang bagus (Patrick, 2007), maka Pemerintahan Daerah sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan besarnya aset yang dimiliki, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi tersebut.

Rasio Kemandirian Finansial menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Hal itu menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik. (Halim, 2002 : 128).

Sedangkan Ketersediaan Laporan Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator Transparansi (Kristianten, 2006 : 73). Sedangkan dalam pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo, pengungkapan informasi keuangan daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah. Dimana Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik *Good Governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2002 : 18). Dan menurut Humanitarian Forum Indonesia ada 6 prinsip transparansi salah satunya adalah adanya *Website* atau media publikasi organisasi.

Dihubungkan dengan Teori Signalling bahwa semakin besar Rasio Kemandirian Finansial maka tingkat ketergantungan semakin rendah. Hal itu menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik dan mandiri (Halim, 2002 :128). Dengan kinerja pemerintahan yang baik, maka Pemerintahan Daerah sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah terbut, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi tersebut.

Produk Domestik Bruto digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan dari tahun ke tahun, juga untuk mengevaluasi dan membuat pedoman standar hidup di negara itu, dan untuk mengukur kesejahteraan

masyarakat, jadi semakin besar pendapatan perkapita menunjukkan bagusnya kinerja pemerintahan (Tjukanov, 2011).

Sedangkan Ketersediaan Laporan Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator Transparansi (Kristianten, 2006 : 73). Sedangkan dalam pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo, pengungkapan informasi keuangan daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah. Dimana Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik *Good Governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2002 : 18). Dan menurut Humanitarian Forum Indonesia ada 6 prinsip transparansi salah satunya adalah adanya *Website* atau media publikasi organisasi.

Dihubungkan dengan Teori Signalling bahwa semakin besar Pendapatan Perkapita Daerah, maka semakin besar pula kinerja daerah. Pendapatan perkapita daerah tersebut diukur dengan produk domestik regional bruto daerah tersebut yang menunjukkan tingkat pendapatan dari sektor-sektor yang ada di daerah tersebut, yang menggambarkan tingkat produktivitas masyarakatnya (Tjukanov, 2011). Dengan itu maka Pemerintahan Daerah sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat

mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi tersebut.

Rasio *Leverage* merupakan tingkat penggunaan uang yang dipinjam oleh pemerintah daerah. Jadi semakin tinggi tingkat *Leverage* maka semakin tinggi tingkat pendanaan pemerintah dan juga semakin tinggi tingkat perlindungan terhadap kreditur apabila terjadi krisis, Mubarakah (2012 : 169)

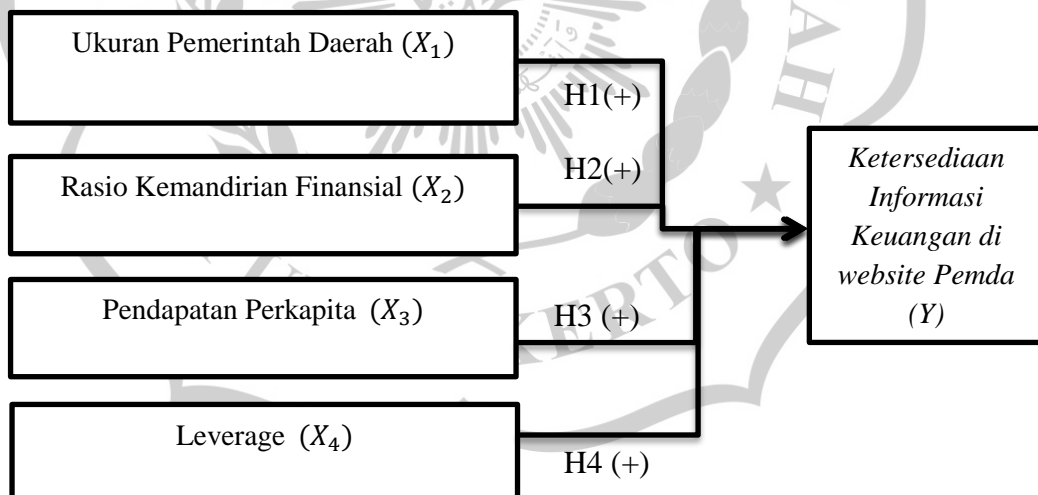
Sedangkan Ketersediaan Laporan Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator Transparansi (Kristianten, 2006 : 73). Sedangkan dalam pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo, pengungkapan informasi keuangan daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah. Dimana Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik *Good Governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2002 : 18). Dan menurut Humanitarian Forum Indonesia ada 6 prinsip transparansi salah satunya adalah adanya *Website* atau media publikasi organisasi.

Dihubungkan dengan Teori Signalling bahwa semakin tinggi tingkat *Leverage* maka semakin tinggi tingkat pendanaan pemerintah dan juga semakin tinggi tingkat perlindungan terhadap kreditur apabila terjadi krisis. Sehingga Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat *Leverage* yang tinggi maka menggambarkan bagusnya kinerja pemerintahan Mubarakah (2012 : 169). Dengan itu, maka Pemerintahan Daerah sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan tingginya tingkat *Leverage*

daerah tersebut, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar kreditur dan masyarakat mengetahui dan dapat mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan kreditur dan masyarakat tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka, peneliti meneliti Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Finansial, Pendapatan Perkapita dan *Leverage* sebagai variabel independen. Dan Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda sebagai variabel dependen. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, Rumusan Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.

Sesuai dengan Teori Signalling, bahwasanya pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah yang memiliki informasi lebih baik mengenai pemerintahannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, bahwa pemerintahannya tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Agar masyarakat mendukung dan tidak terjadi asimetri informasi dengan masyarakatnya.

Semakin besar Ukuran Pemerintahan Daerah dengan aset yang besar pula dapat menunjukkan kinerja pemerintahan yang bagus (Patrick, 2007), maka Pemerintahan Daerah sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan besarnya aset yang dimiliki, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi tersebut.

Pernyataan tersebut didukung oleh Penelitian Achmad (2014), dan Nosihana (2016), menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. suatu pemda yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer

kekayaan yang besar pula, sehingga pemda akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Sedangkan penelitian dari Wau (2015) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah. Membuktikan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan *IFR* pada *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat disusun sebuah hipotesis pertama sebagai berikut:

H_1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.

2. Pengaruh Rasio Kemandirian Finansial terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.

Sesuai dengan Teori Signalling, bahwasanya pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah yang memiliki informasi lebih baik mengenai pemerintahannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, bahwa pemerintahannya tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Agar masyarakat mendukung dan tidak terjadi asimetri informasi dengan masyarakatnya.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, semakin rendah, begitu

juga sebaliknya. Hal itu menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik (Halim, 2002 : 128). Dengan kinerja pemerintahan yang baik, maka Pemerintahan Daerah sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah tersebut, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi tersebut.

Pernyataan tersebut didukung oleh Medina (2012), dan Wicaksono, Dkk. (2016) bahwa Rasio kemandirian finansial berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. ukuran kemandirian setiap pemerintah mempengaruhi bagaimana seharusnya pengungkapan laporan keuangan publik itu berjalan. Sedangkan penelitian dari Idris, Dkk (2018) menndapatkan hasil bahwa rasio kemandirian finansial tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan di *website* Pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat disusun sebuah hipotesis kedua sebagai berikut:

H_2 : Rasio Kemandirian Finansial berpengaruh positif terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.

3. Pengaruh Pendapatan Perkapita Daerah terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.

Sesuai dengan Teori Signalling, bahwasanya pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah yang memiliki informasi lebih baik mengenai pemerintahannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, bahwa pemerintahannya tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Agar masyarakat mendukung dan tidak terjadi asimetri informasi dengan masyarakatnya.

Semakin besar Pendapatan Perkapita Daerah, maka semakin besar pula kinerja daerah. Pendapatan perkapita daerah tersebut diukur dengan produk domestik regional bruto daerah tersebut yang menunjukkan tingkat pendapatan dari sektor-sektor yang ada di daerah tersebut, yang menggambarkan tingkat produktivitas masyarakatnya (Tjukanov, 2011). Dengan itu maka Pemerintahan Daerah sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi tersebut.

Didukung dari hasil penelitian Perez, dkk (2014), dan Wau (2015), bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. Pendapatan per kapita

merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah, dan semakin tinggi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan dalam mengadopsi teknologi untuk mendapatkan informasi. Sedangkan penelitian oleh Wicaksono (2016) mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan pada *website* pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat disusun sebuah hipotesis ketiga sebagai berikut :

H_3 : Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.

Sesuai dengan Teori Signalling, bahwasanya pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah yang memiliki informasi lebih baik mengenai pemerintahannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, bahwa pemerintahannya tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Agar masyarakat mendukung dan tidak terjadi asimetri informasi dengan masyarakatnya.

Semakin tinggi tingkat *Leverage* maka semakin tinggi tingkat pendanaan pemerintah dan juga semakin tinggi tingkat perlindungan terhadap kreditur apabila terjadi krisis, Mubarakah (2012 : 169). Sehingga Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat *Leverage* yang tinggi maka menggambarkan bagusnya kinerja pemerintahan. Dengan itu, maka Pemerintahan Daerah

sebagai eksekutif akan terdorong untuk memberikan sinyal positif bahwasanya kinerja pemerintahannya tergolong bagus diukur dengan tingginya tingkat *Leverage* daerah tersebut, dengan mengungkapkan ketersediaan informasi keuangan di *Website* Pemerintah Daerah masing-masing. Bertujuan agar kreditur dan masyarakat mengetahui dan dapat mendorong kinerja bagus pemerintahan tersebut, serta mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan kreditur dan masyarakat tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Achmad (2014), dan Hasibuan (2017) bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Semakin tinggi leverage membuat pemda cenderung bersikap lebih transparan dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui internet guna memfasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh kreditur Achmad (2014). Sedangkan dalam penelitian oleh Nosihana (2016) Bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan di website pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat disusun sebuah hipotesis pertama sebagai berikut:

H_4 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan di *Website* Pemda.